

PUSAT PENGAJIAN DAN INFORMASI KEDIRGANTARAAN



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2014 (PERUBAHAN KEDUA)

**Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Tahun 2013**



Rencana Strategis Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan (Pusjigan) 2011 - 2014 disusun dan ditetapkan sebagai turunan dari Rencana Strategis Deputi Bidang Sains Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan (Desains) khususnya dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) umumnya.

Rencana Strategis Pusjigan Tahun 2011 - 2014 adalah pedoman dan sekaligus sebagai panduan dalam pengukuran kinerja kegiatan yang berlangsung di Lingkungan Pusjigan dalam kurun waktu tugas Tahun 2011 - 2014. Rencana Strategis Pusjigan Tahun 2011 - 2014 ini ditetapkan dan diberlakukan sejak awal tahun anggaran 2011.

Dari sisi waktu Rencana Strategis Pusjigan Tahun 2011 - 2014 akan menjadi alat ukur awal dari masa tugas yang ditetapkan, karena saat ini memasuki tahun kegiatan 2011 dan tentunya akan dijadikan dasar dalam penentuan perencanaan strategis Pusjigan 2011 - 2014.

Kepala
Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan

Drs. Husni Nasution, MSi.



	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan permasalahan	6
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	10
2.1 Visi	10
2.2 Misi	10
2.3 Tujuan	11
2.4 Sasaran Strategis dan Target Utama	11
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
2.6 Kaitan Antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
2.7 Kaitan Antara Program, Kegiatan dan Indikator	12
2.8 Kaitan Antara Program, Kegiatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	12
2.9 Target Pembangunan Pusjigan Tahun 2010 – 2014	13
2.10Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Pusjigan sampai dengan 2014	14
BAB III PENUTUP	15



1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dilakukan perubahan struktur organisasi di lingkungan Lapan termasuk Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan (Pussisfogan). Nomenklatur Pussisfogan berubah menjadi Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan (Pusjigan). Dengan adanya Peraturan Kepala tersebut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pussisfogan 2010-2014. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusjigan berdasarkan organisasi Lapan yang baru seperti yang tertuang dalam Renstra Pusjigan yang merupakan turunan dari Renstra Lapan 2010-2014. Pada tahun kedua dari Renstra Pusjigan dan tahun pertama dari penyempurnaan organisasi Lapan, adalah waktu yang sangat tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan Renstra Pusjigan di tahun-tahun sebelumnya sebagai masukan bagi Pusjigan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan kepentingan nasional dalam rangka penguasaan, penerapan dan pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) kedirgantaraan untuk mendukung pembangunan nasional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan 2012-2014. Banyak dinamika yang dirasakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Pusjigan dalam Renstra 2010-2014. Berbagai upaya dan kerja keras telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia Pusjigan dalam perannya baik dalam melakukan pengkajian kebijakan dan dalam perancangan peraturan perundang-undangan, maupun di dalam membantu penelitian di bidang kedirgantaraan, namun berbagai upaya dan kerja keras ini masih tetap terus dilakukan ke depan.

Dalam kurun waktu 2010-2014, sasaran strategis yang telah ditetapkan dan ingin dicapai Pusjigan tertuang dalam 5 (lima) misi Pusjigan yaitu:

- Mengkaji aspek politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan kedirgantaraan nasional;
- Mengkaji aspek hukum dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan kedirgantaraan nasional;
- Mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan dalam rangka partisipasi Indonesia di fora internasional dan kerjasama dengan organisasi internasional bidang kedirgantaraan;
- Mengkaji sistem teknologi informasi dan komunikasi kedirgantaraan nasional dan internasional;
- Mengkaji isu-isu strategis dan aktual di bidang kedirgantaraan untuk mendukung tugas-tugas Kepala Lapan selaku Sekretaris Depanri (*SK Kepala Lapan Nomor 118 Tahun 2011 tentang Penetapan Sekretariat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (Depanri)*).

Evaluasi terhadap capaian dari sasaran strategis di atas difokuskan pada evaluasi capaian kegiatan yang dilakukan pada Renstra 2005-2009 dan tahun 2010 dari Renstra Pusjigan 2010-2014.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran srategis Pusjigan adalah sebagai berikut:

a. Mengkaji dan menyusun kebijakan-kebijakan dan strategi sistem pembangunan kedirgantaraan yang berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam penguasaan teknologi (dalam rangka kemandirian) penerbangan, peroketan, dan ruas bumi telah dirumuskan kebijakan nasional yang diperlukan antara lain memuat: (i) menetapkan bahwa penguasaan teknologi kedirgantaraan adalah program prioritas nasional yang sepenuhnya didukung untuk pencapaian kejayaan bangsa; (ii) perlu adanya kebijakan perundang-undangan keantariksaan sebagai sebuah payung hukum untuk kegiatan pengembangan teknologi penerbangan, peroketan dan satelit di Indonesia; (iii) perlu diambil langkah politis yang berani untuk menetapkan

bahwa pengembangan teknologi penerbangan, satelit dan roket pengorbit satelit merupakan program nasional dengan disertai adanya komitmen nasional dari pemerintah dan legislatif serta adanya langkah politis dan komitmen nasional yang menjamin ketersediaan pendanaan yang mencukupi dan berkesinambungan; dan (iv) peningkatan peran dan fungsi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (Depanri) dalam mendorong penguasaan teknologi kedirgantaraan.

Terkait dengan peningkatan peran Depanri, Pusjigan sebagai pelaksana Kesekretariatan Depanri (Keputusan Kepala Lapan Nomor 118 Tahun 2011) secara optimal menyiapkan pertemuan dan bahan-bahan terkait dengan isu strategis pembangunan kedirgantaraan nasional bagi bahan pembahasan Panitia Teknis Depanri. Isu strategis ini juga telah dibahas dalam Seminar dan Lokakarya Depanri yang diselenggarakan secara berturut-turut pada bulan Nopember tahun 2010 dan 2011. Tindak lanjut dari seminar tahun 2010 dan lokakarya 2011 telah dihasilkan rekomendasi

yang pada intinya membangun kembali industri penerbangan nasional khususnya bagi penerbangan perintis.

Terkait dengan kemandirian di dalam peluncuran satelit,



Gambar 1.1 : Seminar Depanri di Puspitek – Serpong

telah disusun Roadmap Roket Pengorbit Satelit yang memuat kemampuan nasional saat ini, aspek hukum yang diperlukan, tahapan pengembangan kemampuan, pengembangan SDM, anggaran dan strategi pencapaiannya.

- b. Mengkaji dan mengembangkan sikap dan pandangan keantariksaan/kedirgantaraan untuk kepentingan perjuangan Republik Indonesia pada berbagai fora internasional**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kedirgantaraan nasional di dalam berbagai fora internasional telah dirumuskan kebijakan/pandangan secara nasional baik untuk forum-forum yang ada dalam sistem PBB maupun untuk forum di luar sistem PBB. Kebijakan/pandangan secara nasional yang telah di susun antara lain untuk pertemuan-pertemuan ke sidang-sidang UNCOPUOS (*the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*) dan APSCO (*the Asia-Pacific Space Cooperation Organization*). Dalam merumuskan bahan kebijakan tersebut dilakukan pembahasan antar kementerian dan instansi terkait lainnya di bidang kedirgantaraan. Untuk meningkatkan peran kedirgantaraan di masa datang bagi kesejahteraan bangsa Indonesia serta untuk perlindungan kepentingan nasional lainnya perlu dirumuskan kebijakan/pandangan nasional di berbagai fora internasional secara konkrit dan jelas yang berlandaskan hasil kajian yang dilakukan secara nasional dan berkesinambungan. Juga telah dilakukan kajian terhadap CTBT dan *Space Asset Protocol* dari konvensi *Mobile Equipment*.

c. Meningkatkan terbangunnya perangkat atau instrumen hukum/ aturan-aturan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kedirgantaraan nasional melalui ratifikasi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kedirgantaraan nasional bagi kesejahteraan bangsa melalui penyelenggaraan kedirgantaraan, telah disusun Naskah Akademis (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keantariksaan dan Rancangan Peraturan lainnya. Keduanya merupakan payung hukum untuk menjamin kelangsungan kegiatan keantariksaan di Indonesia dan mengimplementasikan berbagai ketentuan internasional yang sudah diratifikasi untuk menata dan mengatur semua keantariksaan di Indonesia guna mencapai kemandirian di bidang teknologi antariksa dan penataan kelembagaan keantariksaan yang pada gilirannya mampu mendorong pencapaian tujuan nasional. NA dan RUU tentang Keantariksaan telah dibahas dalam Tim antar Kementerian dan selanjutnya dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan

HAM. RUU Keantariksaan telah dibahas dengan DPD-RI dan saat ini sedang dibahas di DPR-RI.



Gambar 1.2: Pembahasan RUU Keantariksaan di DPD-RI

d. Mengkaji dan mengembangkan jaringan sistem informasi kedirgantaraan nasional

Dalam rangka pengembangan sistem informasi kedirgantaraan sebagaimana tertuang dalam Renstra Lapan 2005-2009 telah dilakukan pengkajian Sistem Informasi Aset Litbang Kedirgantaraan Nasional dan Rancangan Sistem Informasi UN-SPIDER (*United Nations Platform for Spacebase Information for Disaster Management and Emergency Response*). Kajian Rancangan Sistem Informasi UN-SPIDER ini berbasis antariksa ini dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Mitigasi Bencana Alam (SIMBA) Lapan berkomunikasi ke semua negara dan organisasi regional dan internasional terkait dengan dukungan instansi nasional terkait guna mengatasi penanggulangan bencana.

1.2 Potensi dan Permasalahan

a. Pentingnya penguatan peranan kebijakan pembangunan kedirgantaraan untuk melindungi kepentingan nasional dalam pendayagunaan Iptek dirgantara

- 1) Pendayagunaan Iptek dirgantara telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan nasional antara lain seperti telekomunikasi, navigasi, pengelolaan sumberdaya alam, pemantauan lingkungan dan cuaca, dan mendukung pertahanan keamanan NKRI.
- 2) Kebijakan kedirgantaraan sangat penting dalam rangka menentukan arah dan tujuan pembangunan kedirgantaraan nasional ke depan serta menjamin kelangsungan di dalam pendayagunaan Iptek dirgantara.
- 3) Penguatan kebijakan kedirgantaraan sangat penting dalam rangka mengisi kekosongan yang ada di dalam peraturan nasional di bidang pendayagunaan dirgantara.
- 4) Penguatan peranan kebijakan kedirgantaraan sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan nasional dalam pendayagunaan Iptek dirgantara.

b. Potensi kekuatan

- 1) Hasil kajian yang telah dijadikan dasar di dalam meratifikasi beberapa peraturan internasional dan kerjasama di bidang keantariksaan.
- 2) Terbinanya koordinasi dengan berbagai instansi anggota Depanri dan instansi terkait lainnya untuk merumuskan isu strategis dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan kedirgantaraan nasional ke depan.
- 3) Kegiatan pengkajian kebijakan bagi pengembangan dan/atau perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional untuk perlindungan

kepentingan nasional mendorong peningkatan fokus pengkajian/perumusan kebijakan di bidang kedirgantaraan.

- 4) Memiliki tupoksi dalam pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kedirgantaraan, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbagai disiplin ilmu, dan sumber dana dari APBN untuk melaksanakan tupoksi Pusjigan.

c. Kelemahan

- 1) Forum Depanri yang merupakan forum tingkat tinggi di bidang kedirgantaraan belum dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam mendukung pengkajian kebijakan di bidang kedirgantaraan.
- 2) Sarana dan prasarana yang ada belum cukup memadai untuk mendukung seluruh kegiatan.
- 3) Belum semua kegiatan kajian dapat menghasilkan bahan rekomendasi kebijakan yang tepat waktu dan tepat guna untuk pengambilan kebijakan terkait.
- 4) Ketersediaan SDM dari sisi kuantitas maupun kualitas masih kurang di bandingkan dengan pengkajian yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena minimnya pengembangan SDM baik melalui pendidikan latihan profesional maupun melalui pendidikan berjenjang S2 dan S3.

d. Peluang

- 1) Misi Lapan 2010-2014 di bidang kebijakan "Mengembangkan kajian kebijakan bagi pengembangan dan/atau perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional untuk perlindungan kepentingan nasional

dalam rangka penguasaan, penerapan dan pendayagunaan Iptek kedirgantaraan (roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh dan sains antariksa) bagi mendukung pembangunan nasional”.

- 2) Kegiatan peroketan dan persatelitan serta pemanfaatan teknologi antariksa di berbagai sektor (telekomunikasi, navigasi, penginderaan jauh) sebagai program nasional maupun program Lapan memerlukan perencanaan kebijakan yang tepat. Depanri yang saat ini berfungsi sebagai wadah koordinasi kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Hal ini memerlukan dukungan bahan-bahan kajian kebijakan yang berkualitas. Selain itu Indonesia hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang memadai di bidang kedirgantaraan, terutama keantariksaan, sebagai implementasi dari berbagai konvensi dan perjanjian internasional di bidang keantariksaan.
- 3) Dampak perkembangan kedirgantaraan global menuntut perlunya tindakan antisipatif nasional dan untuk itu perlu adanya kebijakan-kebijakan dan peraturan perundangan yang segera dibentuk, dan dapat diberlakukan segera dalam rangka melindungi dan memberikan kepastian hukum penyelenggaraan kedirgantaraan di tingkat nasional yang selaras dengan kepentingan internasional.
- 4) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya informasi kedirgantaraan.

e. Tantangan

- 1) Kebijakan politik anggaran nasional yang belum berpihak kepada pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang kedirgantaraan yang akhirnya berdampak pula bagi anggaran di Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan.

- 2) Kebutuhan pengembangan SDM perlu terus ditingkatkan khususnya dalam bidang kebijakan dan peraturan perundang-undangan namun di sisi lain adanya keterbatasan anggaran dan SDM itu sendiri (*Zero-minus Growth*).
- 3) Kebutuhan hasil pengkajian kebijakan yang berkualitas oleh pengambil kebijakan (*policy driven research*) yang dapat menjawab isu-isu strategis terkini.
- 4) Kebutuhan bahan kebijakan dan kajian akademis peraturan perundang-undangan di bidang kedirgantaraan yang tepat waktu dan tepat guna untuk kepentingan nasional.



2.1 Visi

"MENJADI PUSAT KEUNGGULAN PENKAJIAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEDIRGANTARAAN".

2.2 Misi

1. Mengkaji aspek teknis dan sosio-ekonomi untuk pengembangan dan/ atau perumusan bahan kebijakan dalam penguasaan, penerapan, dan pendayagunaan Iptek kedirgantaraan.
2. Mengkaji kebijakan tentang isu strategis dan aktual di bidang kedirgantaraan nasional untuk pengembangan dan/atau perumusan bahan kebijakan dalam penguasaan, penerapan, dan pendayagunaan Iptek kedirgantaraan.
3. Mengkaji perkembangan masalah kedirgantaraan untuk pengembangan dan/atau perumusan bahan kebijakan dalam penguasaan, penerapan, dan pendayagunaan Iptek kedirgantaraan serta partisipasi Indonesia di fora internasional.
4. Mengkaji aspek yuridis normatif dan empiris masalah-masalah di bidang kedirgantaraan untuk pengembangan dan/atau perumusan peraturan perundang-undangan dalam penguasaan, penerapan, dan pendayagunaan Iptek kedirgantaraan.
5. Mengkaji aspek teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan dan/atau perumusan bahan kebijakan dalam penguasaan, penerapan, dan pendayagunaan Iptek kedirgantaraan.

2.3 Tujuan

Tujuan Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan merupakan penjabaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut. Dengan mengacu Renstra Pusjigan 2010 - 2014, maka tujuan Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan adalah terwujudnya bahan Kebijakan Kedirgantaraan Nasional (*National Aerospace Policy*)

2.4 Sasaran Strategis

1. Peningkatan kemampuan dalam perumusan kebijakan kedirgantaraan
2. Peningkatan kemampuan kajian kebijakan kedirgantaraan

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Jumlah bahan rumusan kebijakan kedirgantaraan
2. Jumlah publikasi ilmiah serta bahan pedoman delegasi RI di fora kedirgantaraan internasional

2.6 Kaitan Antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2-1 menunjukkan kaitan antara tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama (IKU). Melalui tabel tersebut terlihat jenis IKU sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan.

TABEL 2-1 : TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN IKU

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terwujudnya bahan Kebijakan Kedirgantaraan Nasional (<i>National Aerospace Policy</i>)	Peningkatan kemampuan dalam perumusan kebijakan kedirgantaraan	Jumlah bahan rumusan kebijakan kedirgantaraan
	Peningkatan kemampuan kajian kebijakan kedirgantaraan	Jumlah publikasi ilmiah serta bahan pedoman delegasi RI di fora kedirgantaraan internasional

2.7 Kaitan Antara Program, Kegiatan dan Indikator

Tabel 2-2 menunjukkan kaitan antara program, kegiatan, dan indikator. Melalui tabel tersebut terlihat indikator dari program yang dilaksanakan.

TABEL 2-2 : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	Pengembangan Pengkajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan	1. Jumlah bahan rumusan kebijakan kedirgantaraan 2. Jumlah publikasi ilmiah serta bahan pedoman delegasi RI di fora kedirgantaraan internasional

2.8 Kaitan Antara Program, Kegiatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2-3 menunjukkan kaitan antara program, kegiatan, Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama. Melalui tabel tersebut terlihat indikator kinerja utama dari program yang dilaksanakan.

TABEL 2-3: PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN STRATEGIS DAN IKU

Program	Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa.	Pengembangan Pengkajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan	Peningkatan kemampuan dalam perumusan kebijakan kedirgantaraan	Jumlah bahan rumusan kebijakan kedirgantaraan
		Peningkatan kemampuan kajian kebijakan kedirgantaraan	Jumlah publikasi ilmiah serta bahan pedoman delegasi RI di fora kedirgantaraan internasional

2.9 Target Pembangunan Pusjigan Tahun 2013 - 2014

Tabel 2-4 menunjukkan Target Pembangunan Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

TABEL 2-4: TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Peningkatan kemampuan dalam perumusan kebijakan kedirgantaraan	Jumlah bahan rumusan kebijakan kedirgantaraan	11 naskah kajian kebijakan
Peningkatan kemampuan kajian kebijakan kedirgantaraan	Jumlah publikasi ilmiah serta bahan pedoman delegasi RI di fora kedirgantaraan	15 makalah publikasi
		3 naskah bahan pedoman delegasi RI di Forum UNCOPUOS

TABEL 2-5: TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Peningkatan kemampuan dalam perumusan kebijakan kedirgantaraan	Jumlah bahan rumusan kebijakan kedirgantaraan	11 naskah kajian kebijakan
Peningkatan kemampuan kajian kebijakan kedirgantaraan	Jumlah publikasi ilmiah serta bahan pedoman delegasi RI di fora kedirgantaraan	15 makalah publikasi
		3 naskah bahan pedoman delegasi RI di Forum UNCOPUOS

2.10 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Pusjigan sampai dengan 2014

Tabel 2-6 Menunjukkan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan sampai dengan tahun 2014.

TABEL 2-6: KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014

Kegiatan	Kebutuhan Pendanaan Pembangunan (dln Ribuan)					Jumlah
	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
Pengembangan Pengkajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan	7.584.076	10.473.140	13.128.655	11.290.531	12.158.706	54.635.108



Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan (Pusjigan) Tahun 2011-2014 disusun dan ditetapkan sebagai alat pengukuran kinerja pada tahun berjalan selama empat tahun ke depan, sekaligus menjadi arah dan landasan bagi penanggung jawab kegiatan di lingkungan Pusjigan baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang diembannya.